BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Program dan kegiatan prioritas merupakan progam dan kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2016 untuk mendukung terwujudnya visi, misi dan tujuan pembangunan yang tercantum dalam RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2013-2017. Bab ini menjelaskan program dan kegiatan yang menjadi prioritas dalam pembangunan Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2016 berdasarkan evaluasi pembangunan tahun sebelumnya dan rencana target capaian kinerja program yang ditetapkan dalam RPJMD.

Seperti yang sudah lazim dilaksanakan, penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah selain dalam rangka pencapaian target RPJMD juga harus menampung aspirasi masyarakat melalui Rembuk RW dan Musrenbang tingkat Kelurahan, Kecamatan, Kota/Kabupaten dan Provinsi. Oleh karena itu dalam BAB ini selain kegiatan prioritas berdasarkan program dan target RPJMD, akan disampaikan pula data kegiatan yang menjadi prioritas karena merupakan aspirasi masyarakat melalui pelaksanaan Rembuk RW, hasil Musrenbang dan hasil Reses DPRD dalam bentuk pokok-pokok pikiran DPRD yang telah diparipurnakan serta hasil rekomendasi DPRD atas Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur Provinsi DKI Jakarta tahun 2014.

Secara keseluruhan proses penyusunan Rencana program dan kegiatan prioritas daerah dilakukan melalui lima pendekatan yaitu Teknokratik, partisipatif, politik, *top down - bottom up* sehingga diharapkan diperoleh hasil yang akuntabel dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat Jakarta.

5.1 Pendekatan Teknokratik

Yang dimaksud dengan Pendekatan teknokratis dalam penyusunan RKPD Tahun 2016 adalah proses yang pada prinsipnya mengedepankan penggunaan metoda dan kerangka berpikir ilmiah dan sistematik dalam melakukan analisis masalah. Dalam hal ini proses teknokratik digunakan pada proses penyusunan perkiraan ekonomi makro daerah dan menyusun rencana program dan kegiatan pembangunan.

Selain itu pendekatan teknokratik dilakukan melalui forum diskusi dan konsultasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pejabat fungsional perencana, tenaga ahli dari lembaga/institusi dan perguruan tinggi; serta staf perencana dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

5.2 Pendekatan Partisipatif dan *botttom up – top down*

Yang dimaksud dengan pendekatan partisipastif dalam hal ini adalah proses yang dilakukan dengan mengembangkan forum konsultasi publik yang melibatkan tokoh masyarakat dan organisasi masyarakat dalam merumuskan masalah dan prioritas pembangunan daerah tahun 2016. Hal ini dijalankan melalui Musrenbang dan dialog interaktif dengan pemangku kepentingan guna menyusun Rencana Kerja yang akuntabel.

Pendekatan bottom-up dilakukan dengan memperhatikan usulan dari kelurahan, kecamatan dan kota/kabupaten melalui forum Musrenbang mulai dari Rembuk RW, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Musrebang Kota/Kabupaten, dan Musrenbang Provinsi. Hasil usulan perencanaan dari bawah (bottom - up) selanjutnya disinkronkan dengan kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang tercantum dalam RKP Tahun 2016.

Selanjutnya pendekatan *top - down* yang dilaksanakan untuk penyusunan RKPD tahun 2016 dijalankan melalui penyusunan Rencana Kerja dengan mengacu pada agenda dan prioritas pembangunan nasional yang tercantum dalam RKP Tahun 2016 dan arah kebijakan dalam RPJMN 2015 - 2019. Selain itu dengan mengakomodir arahan pimpinan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

5.2.1 Rencana Kerja 2016 Hasil Rembuk RW

Rembuk RW adalah musyawarah masyarakat di tingkat Rukun Warga (RW) untuk mengidentifikasi masalah, kebutuhan, dan menentukan kegiatan untuk menyelesaikan masalah berdasarkan skala prioritas yang hasilnya dirumuskan bersama.

Masukan dari proses Rembuk RW untuk RKPD 2016 menjadi bahan masukan yang sangat penting. Proses Rembuk RW menghasilkan usulan masyarakat yang dapat ditampung menjadi kegiatan berupa Rencana Kerja Kelurahan, Kecamatan dan SKPD/UKPD. Kegiatan hasil rembuk RW ini sejumlah **4.683 kegiatan.** Dari jumlah ini, total anggarannya mencapai **Rp.3,224 Triliun.** Selanjutnya kegiatan ini akan diserap dan menjadi Rencana Kerja di tingkat Kelurahan, Kecamatan, dan UKPD tingkat Kota/Kabupaten serta SKPD tingkat Provinsi.

5.2.1.1 Hasil Musrenbang Kelurahan yang diakomodir dalam Rencana Kerja Kelurahan

Rembuk RW yang dilakukan di tingkat Rukun Warga prosesnya dilakukan dengan melibatkan masyarakat. Hasil dari Rembuk RW di bahas di forum Musrenbang Kelurahan yang diikuti oleh unsur masyarakat, aparat kelurahan dan pemangku kepentingan lainnya.

Musrenbang Kelurahan adalah forum antar pemangku kepentingan (stakeholder) dalam rangka menyusun rencana kerja pemerintah daerah tingkat kelurahan untuk jangka waktu satu tahun. Adapun tujuan dari Musrenbang Kelurahan adalah :

a. Menentukan kegiatan prioritas hasil Rembuk RW yang menjadi kewenangan Kelurahan sesuai dengan pagu Kelurahan.
b. Untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap usulan Rencana Kegiatan pembangunan di wilayah kelurahan.
c. Menentukan perwakilan (unsur masyarakat) untuk mengikuti Musrenbang Kecamatan.

Dari pelaksanaan Musrenbang Kelurahan, dapat diinventarisir hasil kesepakatan musrenbang Kelurahan sejumlah **1.974 kegiatan** dengan nilai anggaran mencapai **Rp.198,26** Milyar untuk ditampung menjadi kegiatan pada Rencana Kerja Kelurahan. Kegiatan - kegiatan ini merupakan hasil dari usulan masyarakat dan hasil rembuk RW. Adapun kegiatan-kegiatan tersebut secara rinci dapat dilihat pada matriks Lampiran 1 yaitu Tabel 5.1. Hasil musrenbang Kelurahan yang ditampung menjadi kegiatan pada SKPD Kelurahan.

5.2.1.2 Hasil Musrenbang Kecamatan yang diakomodir dalam Rencana Kerja Kecamatan

Musrenbang Kecamatan adalah forum antar pemangku kepentingan (stakeholder) dalam rangka menyusun rencana kerja pemerintah daerah tingkat Kecamatan untuk jangka waktu satu tahun. Adapun tujuan dari pelaksanaan Musrenbang Kecamatan adalah :

a. Menetapkan kegiatan prioritas hasil Rembuk RW yang menjadi kewenangan kecamatan sesuai dengan pagu Musrenbang Kecamatan.
b. Untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap usulan Rencana Kegiatan pembangunan di wilayah Kecamatan.
c. Menentukan perwakilan (unsur masyarakat) untuk mengikuti Musrenbang Kota/Kabupaten.

Dari pelaksanaan Musrenbang Kecamatan, dapat diinventarisir hasil kesepakatan musrenbang Kecamatan sejumlah **1.322 kegiatan** dengan nilai anggaran mencapai **Rp.118,60 Milyar** untuk ditampung menjadi kegiatan pada Rencana Kerja Kecamatan. Kegiatan - kegiatan ini merupakan hasil dari usulan masyarakat dan hasil rembuk RW. Adapun kegiatan-kegiatan tersebut secara rinci dapat dilihat pada matriks Lampiran 2 yaitu Tabel 5.2 Hasil Musrenbang Kecamatan yang Ditampung Menjadi Kegiatan pada SKPD Kecamatan.

5.2.1.3 Hasil Musrenbang Kota/Kabupaten yang diakomodir dalam Rencana Kerja Kota/Kabupaten

Musrenbang Kota/Kabupaten adalah forum antar pemangku kepentingan (stakeholder) dalam rangka menyusun rencana kerja pemerintah daerah tingkat Kota/Kabupaten untuk jangka waktu satu tahun. Adapun tujuan dari pelaksanaan Musrenbang Kota/Kabupaten adalah :

a. Menetapkan kegiatan prioritas hasil Rembuk RW yang menjadi kewenangan Kota/Kabupaten sesuai dengan pagu Musrenbang Kota/Kabupaten.
b. Untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap usulan Rencana Kegiatan pembangunan di wilayah Kota/Kabupaten.
c. Menentukan perwakilan (unsur masyarakat) untuk mengikuti Musrenbang Provinsi.

Dari pelaksanaan Musrenbang Kota/Kabupaten, dapat diinventarisir hasil kesepakatan musrenbang Kota/Kabupaten sejumlah **1.386 kegiatan** dengan nilai anggaran mencapai **Rp. 3,00 Triliun** untuk ditampung menjadi kegiatan pada Rencana Kerja UKPD. Kegiatan - kegiatan ini merupakan hasil dari usulan masyarakat dan hasil rembuk RW. Adapun kegiatan-kegiatan tersebut secara rinci dapat dilihat pada matriks Lampiran 3 yaitu Tabel 5.3 Hasil Musrenbang Kota & Kabupaten yang Ditampung Menjadi Kegiatan pada UKPD.

5.2.1.4 Hasil Musrenbang yang diakomodir dalam Rencana Kerja SKPD Provinsi

Musrenbang Provinsi adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Provinsi DKI Jakarta, yang merupakan kelanjutan dari Musrenbang yang dilakukan secara berjenjang dari tingkat kelurahan, kecamatan, dan Kota/Kabupaten administrasi yang lebih lanjut disinkronkan dengan hasil musyawarah forum SKPD yang dilaksanakan pada tingkatan SKPD. Tujuan dari pelaksanaan Musrenbang Provinsi adalah untuk menajamkan, menyelaraskan, mengklarifikasi dan menyepakati Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi DKI Jakarta tahun 2016 yang mencangkup :

a. Program Unggulan dan kegiatan prioritas pembangunan provinsi dengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta unggulan program dan kegiatan hasil Musrenbang Kota/Kabupaten sesuai dengan visi, misi, dan janji Gubernur kepada masyarakat.

b. Indikator dan target kinerja program dan kegiatan pembangunan provinsi sesuai dengan target capaian RPJMD Provinsi DKI Jakarta tahun 2013 – 2017 serta MDG's.
c. Prioritas pembangunan provinsi yang akan diusulkan kepada pemerintah pusat untuk dituangkan dan disinergikan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Dari pelaksanaan Musrenbang Provinsi, hasil kesepakatan musrenbang Provinsi dan musyawarah forum SKPD dirumuskan dalam bentuk Rencana Kerja yang ditampung menjadi kegiatan pada SKPD Provinsi. Adapun kegiatan-kegiatan tersebut dapat dilihat pada matriks Lampiran 4 yaitu Tabel 5.4 Hasil Musrenbang yang Ditampung Menjadi Kegiatan pada SKPD Provinsi.

Dalam Musrenbang Provinsi, selain mengakomodir usulan-usulan yang ditampung dalam Rencana Kegiatan SKPD tingkat Provinsi juga dapat dirumuskan usulan kegiatan yang akan disampaikan ke Musrenbang Nasional. Adapun kegiatan yang diusulkan dalam Musrenbangnas dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. Usulan Kegiatan Strategis Tahun 2016 Yang <u>diusulkan</u> Dalam e-Musrenbangnas dalam rangka penyusunan RKP 2016

1. Pembangunan Jalan Sejajar Tol Meruya – Pondok Pinang

Diusulkan oleh Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta dengan Besaran usulan dana Rp. 467,32 Miliar yang ditujukan ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Keterangan : Pembangunan Fisik (segmen : Meruya – Joglo, Joglo – Cileduk, Cileduk – Ulujami, Ulujami – Pondok Pinang)

2. Pembebasan Tanah Jalan Sejajar Tol Meruya – Pondok Pinang

Diusulkan oleh Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta dengan Besaran usulan dana Rp. 1.246,20 Miliar yang ditujukan ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

3. Pembangunan Rusun Pasar Minggu Jakarta Selatan

Diusulkan oleh Dinas Perumahan dan Gedung Pemda dengan Besaran usulan dana Rp. 1.200,00 Miliar yang ditujukan ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

4. Pembangunan Rusun Pasar Rumput Jakarta Selatan

Diusulkan oleh Dinas Perumahan dan Gedung Pemda dengan Besaran usulan dana Rp. 1.200,00 Miliar yang ditujukan ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

5. Pembangunan SPBG Online dilengkapi Dryer

Diusulkan oleh Dinas Perindustrian dan Energi dengan Besaran usulan dana Rp. 100,00 Miliar yang ditujukan ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

5.3 Pendekatan Politik

Pada prinsipnya pendekatan politik memandang bahwa proses penyusunan rencana harus mengedepankan kehendak dan kepentingan rakyat pemilih yang sudah memberikan hak pilihnya kepada organisasi politik dan Kepala Daerah berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan.

5.3.1 Hasil Reses DPRD dan Rekomendasi DPRD atas LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta tahun 2014

Selain aspirasi masyarakat yang dilakukan melalui pelaksanaan Rembuk RW dan Musrenbang, juga dilakukan penjaringan aspirasi masyarakat dalam bentuk hasil Reses DPRD. Hasil reses ini merupakan pokok – pokok pikiran sebagai bahan utama penyusunan RKPD 2016 setelah diparipurnakan. Secara rinci hasil reses DPRD tersebut disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 5.1 Hasil Reses DPRD

WAKTU RESES	REKOMENDASI DPRD ATAS HASIL RESES
Urusan/Bidang Pemerintahan	
Masa Reses II TA. 2014	• Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menghapusan seluruh retribusi saat mengurus Dokumen Kependudukan, seperti KTP, KK, Akte Kelahiran baik yang baru membuat maupun memperpanjang atau yang terlambat mengurusnya. Selain itu, pelayanan Dokumen Kependudukan pada malam atau hari libur agar dilaksanakan. • Peningkatkan pelayanan apparatus kelurahan dan membantu masyarakat, hendaknya di tiap kelurahan disediakan ambulans gratis. • Satpol PP DKI Jakarta hendaknya rutin menertibkan para gelandangan, pengemis dan PMKS secara manusiawi sekaligus rutin mengadakan operasi untuk mencegah tawuran pelajar dan kriminalitas di lingkungan penduduk serta operasi Minuman Keras (Miras) Oplosan. Disamping itu, Satpol PP hendaknya membantu petugas Kepolisian untuk mengatasi kemacetan di tiap kelurahan. • Warga DKI Jakarta mengeluhkan masih terdapat oknum (calo) di instansi pelayanan umum seperti Tempat Pemakaman Umum (TPU) dan SAMSAT sehingga warga mengeluarkan biaya lebih dari tarif resmi. • Diharapkan Dinas DAMKAR dan Penanggulangan Bencana menambah hydrant dan Alat Pemadam Kebakaran Ringan (APAR) hingga tingkat RW.

WAKTU RESES	REKOMENDASI DPRD ATAS HASIL RESES
	Disamping itu, perlu disediakan gerobak motor untuk menjangkau jalan MHT yang tidak dapat dilalui kendaraan roda empat. • Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) bagi warga DKI Jakarta yang tidak mampu untuk mengurus sertifikat tanah hendaknya diberdayakan dengan meningkatkan jumlah penerima sertifikat. • Warga mengeluhkan mahalnya biaya pengurusan surat keterangan sengketa atau waris (dokumen PMI) dan surat keterangan lainnya yang dibutuhkan masyarakat di setiap wilayah. Untuk itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta member keringanan agar tidak membebani masyarakat.
Urusan/Bidang Perekonomian	
Masa Reses II TA. 2014	• Menertibkan toko-toko modern seperti minimarket yang sekarang menjamur beroperasi di lingkungan penduduk. • Pemberdayaan koperasi-koperasi kembali terutama di Kabupaten Adminsitrasi Kepulauan Seribu. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Membangun Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) untuk menyediakan bahan bakar bagi nelayan. • Perelokasian pedagang yang berjualan di bantaran kali maupun yang berjualan di trotoar jalan ke pasar yang dikelola oleh PD Pasar Jaya.
Urusan/Bidang Perhubungan	
Masa Reses II TA. 2014	• Peremajaan angkutan dan Penambahan armada bus sekolah. • Untuk wilayah Administrasi Kepulauan Seribu, perenovasian seluruh dermaga dan penyediaan angkutan kapal bagi masyarakat yang murah, aman dan nyaman. • Penertiban kendaraan pribadi parkir di atas bahu jalan serta angkutan umum yang ngetem tidak pada tempatnya.
Masa Reses I TA. 2014	• Penambahan petugas penertiban parkir liar.
Urusan/Bidang Pembangunan	
Masa Reses II TA. 2014	• Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi DKI Jakarta hendaknya rutin melakukan penurapan kali dan sungai. Dinas PU Juga diharapkan memperlebar dan melakukan normalisasi saluran air. • Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta menambah Ruang Terbuka Hijau (RTH) seperti taman kota dan taman interaksi warga di pemukiman penduduk hingga tingkat kelurahan. • Dinas Kebersihan segera membersihkan tumpukan sampah tumpukan sampah di kali, pintu air maupun

WAKTU RESES	REKOMENDASI DPRD ATAS HASIL RESES
	pemukiman penduduk. Dinas Kebersihan juga perlu menambah tempat sampah dan gerobak sampah hingga tingkat RT/RW. • Dinas Kebersihan segera merelokasi Tempat Pembuangan Sementara (TPS) yang berada di pinggir jalan dan di tengah pemukiman penduduk. • Warga DKI Jakarta mengeluhkan masih buruknya pelayanan air oleh perusahaan Daerah Air Minum DKI Jakarta. Hal ini masih terlihat dari kecilnya debit air yang keluar dan terkadang keruh. Di sisi lain tarifnya juga mahal. • Pemerinah Provinsi DKI Jakarta menambah pembangunan sumur resapan di wilayah yang masih terkena banjir. • Pembangunan sekolah-sekolah yang terbengkalai dan tidak dilanjutkan segera dilanjutkan. • Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta mengatasi masalah sulitnya memperoleh air bersih pada warga di Kepulauan Seribu.
Masa Reses I Tahun Anggaran 2014	• Penurapan kali dan sungai di wilayah Provinsi DKI Jakarta. • Penambahan petugas pengeruk sampah di Kali dan saluran air lainnya.
Urusan/Kesejahteraan Sosial	
Masa Reses II TA. 2014	• Jumlah penerima beasiswa terus ditingkatkan. • Penambahan fasilitas untuk aktivitas dengan menambah pembangunan gedung olahraga (GOR) dan sarana prasarana pendukung lainnya hingga tingkat kecamatan dan kelurahan. • Dukungan dana operasional dan sarana prasarana kerja seperti kegiatan Kader Jumatik, Posyandu Balita dan Lansia serta PAUD. • Perlu adanya revitalisasi total pada Taman Proklamasi. Termasuk juga 17 situs bersejarah perjuangan kemerdekaan Jakarta lainnya. Diharapkan, semua sistus bersejarah di DKI Jakarta perlu direvitalisasi.
Masa Reses I Tahun Anggaran 2014	• Penambahan tenaga medis (dokter spesialis dan perawat) di Puskesmas dan RSUD • Penambahan jumlah stok obat di apotek RSUD. • Sosialiasi intergrasi KJS dengan BPJS. • Pemberian pelatihan keterampilan wirausaha bagi para pemuda aktif karang taruna. • Panambahan beasiswa (bantuan pendidikan) hingga tingkat perguruan tinggi. • Penambahan gedung olahraga (GOR) dan sarana prasarana pendukungnya.

Sumber: hasil Reses DPRD tahun 2014 yang telah diparipurnakan, diolah

Selain aspirasi masyarakat melalui proses Reses DPRD, penyusunan RKPD 2016 juga mencakup hasil rekomendasi DPRD atas LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta tahun 2014. Hasil rekomendasi tersebut secara terperinci diuraikan per masing – masing urusan pada Tabel 5.2 yang dijadikan acuan penyusunan Rencana Kerja tahun 2016:

Tabel 5.2 Rekomendasi DPRD atas LKPJ 2014

WAKTU RESES	REKOMENDASI DPRD ATAS LKPJ
BIDANG PEMERINTAHAN	
Urusan Perencanaan Pembangunan	• kelembagaan perencanaan kurang berkualitas • perencanaan pembangunan tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat
Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.	• masih tingginya konflik vertical dan horizontal • lemahnya pembinaan pemerintah terhadap Ormas dan LSM • belum optimlanya pembinaan FKDM
Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.	• rendahnya kualitas pembinaan aparatur • Pemprov seringkali mengalami kekalahan dalam penyelamatan aset pengadilan • Kurang optimalnya kualitas kinerja SDM dan kapasitas kelembagaan berjalan kurang efektif dan efisien • Kerjasama antar daerah dan luar negeri selama ini kurang efektif dan masih bersifat ceremonial • belum diprioritaskan penyelesaian masalah kota Jakarta yang bersifat krusial dan mendesak seperti, penyelesaian macet, penyelesaian banjir dan lapangan pekerjaan melalui kerjasama . • Penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan SDM Aparatur belum menjawab harapan masyarakat yang menginginkan SDM aparatur bekerja cepat, tepat dan efektif serta profesional. • pidato Gubernur tidak konsisten dengan sikap dan perilaku Gubernur • Masih minimnya pengetahuan dan kemampuan aparatur penangulangan resiko bencana • Minimnya sarana dan prasarana sistem peringatan dini bencana • masih minimnya jumlah SDM penanggulangan bencana • masih kurangnya pengetahuan masyarakat soal bencana • Belum tersedinya titik-titik lokasi jalur evakuasi saat terjadi bencana dan • belum memadainya keberadaan gudang buffer stock

WAKTU RESES	REKOMENDASI DPRD ATAS LKPJ
	disetiap Kelurahan. • minimnya pengelolaan sarana informasi, data dan informasi pelaporan bencana • kurangnya jumlah dan kualitas SDM petugas pemadam kebakaran. • Lemahnya Penegakkan Perda No. 8 tahun 2008 dan Pergub tentang keselamatan kebakaran • system penanggulangan kebakaran sudah out of date • respon time petugas pemadam perlu ditingkatkan • kurangnya instalasi hydran di kawasan pemukiman padat/ rawan kebakaran • kurangnya pelatihan dan pengembangan SDM Pegawai PTSP • kurangnya sarana dan prasarana PTSP • pelaksanaan penertiban umum kurang humanis • penegakan peraturan yang tidak konsisten dan kontinyu, • kurangnya pelibatan masyarakat sebagai stakeholder dan whistleblower terhadap gangguan keamanan dan lingkungan • kurangnya sarana dan prasarana satpol PP
Urusan Statistik	• kurangnya penyebarluasan informasi statistik dan peta potensi wilayah
Urusan Komunikasi dan Informatika	• kurangnya pelatihan dan pengembangan pemanfaatan IT di Kelurahan dan Kecamatan • Kurangnya sarana dan prasarana IT di Kelurahan dan Kecamatan • kurangnya sosialisasi prosedur dan persyaratan administrasi lelang • kurangnya tempat dan SDM pelayanan informasi (customer service) • kurangnya pengamanan dan pengelolaan aset-aset PemProv • kurangnya penataan jaringan listrik di lingkungan permukiman • kurangnya sosialisasi prosedur evakuasi bencana • kurangnya sosialisasi prosedur evakuasi bencana dan kurangnya sarana prasarana penanggulangan bencana • kurangnya anggaran untuk penataan permukiman kumuh • kurangnya penindakan kepada pengembang yang belum menyerahkan fasos dan fasum • kurangnya pemanfaatan lahan terbuka untuk acara warga • Masih ada wacana untuk mengeluarkan ketentuan yang kontra produktif • kurangnya sosialisasi terserapnya usulan musrenbang ke dalam anggaran, kurangnya sosialisasi

WAKTU RESES	REKOMENDASI DPRD ATAS LKPJ
	penyusunan kegiatan dalam usulan musrenbang • rendahnya penyerapan anggaran
BIDANG PEREKONOMIAN	
Urusan Perhubungan dan Transportasi	• Penyerapan yang rendah dalam sektor Perhubungan jauh dari harapan masyaraka
Urusan Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	• penetapan UMP belum sepenuhnya merujuk pada angka hasil perhitungan kehidupan hidup layak
Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	• Koperasi dan Usaha Kecil penyumbang PDB yang cukup besar • masih rendahnya kinerja Dinas Koperasi dan usaha Kecil Menengah
Urusan Penanaman Modal (BPMP)	• perlunya pengawasan terpadu dalam meningkatkan jumlah perizinan, khususnya izin investasi • Sosialiasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai standar pelayanan masyarakat
Urusan Kebudayaan	• sektor kebududayaan agar tetap menjadi sektor unggulan
Urusan Pertanian	• kurangnya pasokan daging tetapi tidak mengutamakan dari penyediaan oleh BUMD
Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral	• kurangnya pasokan listrik dan upaya penyediaan listrik yang bersumber dari APBD
Urusan Kebudayaan	• perlunya mengembangkan event pariwisata dan kebudayaan lebih banyak dan besar • perlunya mencegah efek negatif dari peningkatan jumlah turis asing
Urusan Kelautan dan Perikanan	• perlunya pengawasan terhadap manajemen dan tata kelola supply chain terhadap distribusi pangan
Urusan Perdagangan	• perlunya peningkatan ekspor dengan promosi dengan tetap menjaga kepentingan konsumen
BIDANG KEUANGAN	
Ekonomi	• perlunya meningkatkan penyerapan anggaran • perlunya menurunkan tingkat inflasi DKI Jakarta agar lebih rendah dari rata2 nasional • perlunya mempercepat pembangunan manusia • perlunya memperbaiki kesejahteraan masyarakat Jakarta dengan memperkecil kesenjangan ekonomi dengan program pembangunan yang pro job, pro poor dan pro growth
PENDAPATAN	• rendahnya realisasi penerimaan pajak daerah • perlunya mengoptimalkan pajak kendaraan bermotor dengan mempermudah pelayanan • mempermudah pelayanan pajak dan kerjasama dengan dealer kendaraan bermotor • meningkatkan kerjasama dengan penyedia bahan bakar melalui penerapan sistem online penjualan

WAKTU RESES	REKOMENDASI DPRD ATAS LKPJ
	bahan bakar • perlunya pengawasan terhadap pemilik sumur • perlunya mengoptimalkan pajak hotel dengan pajak online • perlunya perluasan objek pajak • perlunya kemudahan pengurusan perijinan dan aplikasi GIS untuk penetuan lokasi reklame • perlunya pembedaan tarif off dan on street • meningkatkan kerjasama dengan BPN dan pengawasan terhadap jumlah mutasi sertifikat tanah • rendahnya penerimaan pajak rokok • perlunya peningkatan pengawasan terhadap realisasi pembayaran PBB dan penetapan harga NJOP yang wajar • perlunya peningkatan pengawasan terhadap perijinan yang diberikan dengan yang terdapat di lapangan • perlunya peningkatan koordinasi dengan PLN DISJAYA dan penerapan sistem online • perlunya mempercepat revisi Perda 3 Tahun 2012 di Kemendagri • perlunya usulan Raperda tentang sistem jalan berbayar • perlunya evaluasi bagi hasil pendapatan tarif parkir on street • perlunya peningkatan utilisasi dan revitalisasi aset BUMD untuk peningkatan deviden • perlunya evaluasi kontrak kerjasama/kemitraan atas aset yang dikerjasamakan • perlunya perbaikan mekanisme penganggaran untuk pendapatan deviden • rendahnya realisasi lain-lain PAD dan optimalisasi pemanfaatan aset daerah • perlunya evaluasi terhadap penetapan rencana dana perimbangan
BELANJA DAERAH	• rendahnya penyerapan anggaran • perlunya penajaman terhadap prioritas belanja • perlunya penerapan e-catalogue • perlunya pelatihan dan pengembanagn SDM BLPBJ • perlunya sosialisasi persyaratan administrasi dan proses lelang • rendahnya penyerapan PMP • perlunya kajian terhadap mekanisme pengajuan PMP
BIDANG PEMBANGUNAN	
Urusan Pekerjaan Umum	• perlunya sosialisasi perda larangan buang sampah dan penindakan hukumnya • perlunya percepatan perbaikan jalan segera atas jalan yang rusak
Urusan Perumahan Rakyat	• perlunya perencanaan yang matang terhadap penataan kampung/perbaikan rumah

WAKTU RESES	REKOMENDASI DPRD ATAS LKPJ
	• perlunya koordinasi dengan Pemerintah Pusat terkait belum diserahterimakannya Rusun yang bangun Pemerintah Pusat
Urusan Lingkungan Hidup	• perlunya pengawasan terhadap perilaku pemanfaatan air tanah yang mengakibatkan turunnya permukaan air tanah • perlunya ketegasan secara kontinyu penindakan hukum atas perda larangan merokok • perlunya pengawasan terhadap TPA Liar • perlunya evaluasi pembangunan ITF di wilayah DKI serta melakukan tender ulang • rendahnya realisasi TPS-3R dan perlunya sosialisasi perda 3 tahun 2013
Urusan Penataan Kota	• perlunya sosialisasi Perda RTRW, RDTR dan Peraturan zonasi serta situs online sosialisasi RDTR • perlunya penegakan hukum terhadap pemanfaatan ruang dan tertib bangunan sesuai Perda RTRW
Urusan Pertamanan dan Pemakaman	• perlunya inventarisasi dan sosialisasi pemetaan pohon yang berisiko tumbang • rendahnya realisasi pembebasan lahan untuk RTH • perlunya pengawasan dan revitalisasi taman • perlunya penindakan hukum atas RTH, fasos dan fasum di lingkungan perumahan • perlunya evaluasi dalam perencanaan lokasi taman, makam dan TPS serta kajian potensi perluasan area pemakaman
KESEJAHTERAAN SOSIAL	
Urusan Pendidikan	• perlunya ketegasan dari Pemprov untuk menetapkan kurikulum pendidikan yang digunakan • rendahnya jumlah rekrutmen guru • perlunya pelatihan dan pengembangan SDM Guru secara kontinyu • Perlunya pemberian beasiswa bagi para guru berprestasi • rendahnya tenaga dan penghasilan TU di sekolah • perlunya keberadaan tenaga kependidikan yang mengurus kepegawaian guru, penggajian guru, sarpras sekolah dan aset Pemda • rendahnya tenaga dan penghasilan TU di sekolah • perlunya alokasi BOP di sekolah negeri dan swasta untuk mendukung wajar pendidikan 12 tahun • • perlu dipertahankannya KJP • perlu percepatan penyelesaian rehab gedung sekolah dan inventarisasi gedung sekolah yang memerlukan rehab • perlunya pengadaan sarpras untuk sekolah swasta • perlunya pengajuan raperda Pusdiklatjur menjadi sarana peningkatan kualitas guru

WAKTU RESES	REKOMENDASI DPRD ATAS LKPJ
	• perlunya SOTK Dinas Pendidikan yang melayani sekolah-sekolah swasta dengan menambahkan Pejabat Es III dan IV • perlunya pelatihan dan pengembangan SDM Guru PAUD secara kontinyu
Urusan Kesehatan	• perlunya peningkatan kinerja bidang kesehatan • perlunya sinkronisasi data penerima KJS dengan program JKN-BPJS • masih ada warga miskin yang belum memiliki kartu BPJS • perlunya kepastian jaminan pelaksanaan JKN/BPJS dengan menyesuaikan kemampuan daerah agar dapat ikut menyertakan RS dan lembaga pelayanan kesehatan Swasta • rendahnya kapasitas RSUD • Perlunya penyesuaian klasifikasi Puskesmas Kec menjadi Puskesmas Tipe D dan Puskesmas Kel menjadi Puskesmas pelayanan 24 jam • perlunya sosialisasi dan peningkatan partisipasi masyarakat dan puskesmas dalam pencegahan wabah DBD
Urusan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana	• perlunya sinergitas para stakeholder dalam peningkatan kualitas hidup, perlindungan anak dan perempuan • perlunya pembentukan dan penguatan kota layak anak di kelurahan • perlunya koordinasi antara Dinkes dan BPMPKB di bidang pembinaan KB • perlunya peningkatan kewaspadaan dan penanganan serius terhadap penyebaran HIV/AIDS
Urusan Sosial	• perlunya penegakan hukum terhadap PMKS dan PSK secara kontinyu • perlunya peningkatan kapasitas panti • rendahnya kualitas gizi penghuni panti • rendahnya pemanfaatan dan pemberdayaan karang taruna • perlunya keterlibatan masyarakat dalam penanggulangan bencana dan peningkatan sarpras penanggulangan bencana • perlunya inventarisasi anak yatim piatu serta memberikan bantuan terhadapnya
Urusan Olahraga dan Kepemudaan	• perlunya pemberian apresiasi dan pemberdayaan terhadap atlet berprestasi • perlunya koordinasi dan sinergi Disdik, DinKes dan Disorda dalam menciptakan atlit berprestasi • perlunya pemberian perhatian bagi atlit berprestasi yang sudah tidak menjadi atlit • perlunya peningkatan sarpras olahraga • perlunya pembinaan mentalitas remaja

WAKTU RESES	REKOMENDASI DPRD ATAS LKPJ
	• perlunya pengawasan dan pembinaan terhadap organisasi kepemudaan • perlunya pelatihan kewirausahaan bagi pemuda dan peningkatan Balai Latihan
Urusan Perpustakaan dan Arsip;	• perlunya tenaga pustakawan yang profesional dengan tunjangan yang memadai • peningkatan sarpras perpustakaan seperti perpus keliling dan perpustakaan berbasis IT • perlunya peningkatan taman bacaan • perlunya pengelolaan arsip dokumen-dokumen penting dengan e-filling • perlunya koordinasi antara BPAD dan Diskominfomas

Sumber: Hasil Rekomendasi DPRD atas LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta tahun 2014 yang telah diparipurnakan, diolah

Penyusunan Rencana Program Dan Kegiatan Prioritas Daerah pada RKPD 2016 melalui proses Teknokratik, partisipatif, politik, *top down - bottom up* sehingga diharapkan diperoleh hasil yang akuntabel dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat Jakarta. Dengan demikian kegiatan yang akan dilakukan oleh SKPD/UKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan bisa menjawab kebutuhan masyarakat dan tepat sasaran.